BAB III

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan hasil penggalian data yang berasal dari berbagai sumber, diantaranya adalah data yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan dan studi dokumen berupa tulisan dan foto.

Sedangkan dalam sub-bab pembahasan, peneliti akan berusaha menerjemahkan data-data yang telah disajikan menjadi tiga bagian deskripsi kualitatif. Pertama adalah pembahasan terkait manajemen komunikasi bencana Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) Pemerintah Kota Yogyakarta. Kedua adalah kendala dan faktor lain yang dihadapi selama proses kerja dari kantor BKPBD tersebut dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap hal-hal yang dirasa kurang dari aksi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) Pemerintah Kota Yogyakarta pada penanganan bencana lahar hujan wilayah Kali Code pada tahun 2011.

A. SAJIAN DATA

1. Risiko Bencana (*Disaster Risk*)

Berdasarkan pengalaman kejadian pada akhir 2010 dan awal tahun 2011 yang lalu, banjir lahar hujan pasca erupsi Gunung Merapi di Kota Yogyakarta

mengakibatkan kerusakan pada wilayah di sekitar bantaran sungai yang dilalui aliran lahar hujan. Dari lima sungai yang membelah Kota Yogyakarta terdapat satu sungai yang merupakan jalur aliran lahar hujan Gunung Merapi yaitu Sungai Code yang berhubungan langsung dengan Sungai Boyong. Banjir lahar hujan yang melanda Kota Yogyakarta lewat Sungai Code melanda permukiman yang berada di bantaran sungai memberi dampak langsung berupa rusaknya prasarana dasar lingkungan dan permukiman penduduk dalam 50 meter dari tanggul/talud sungai.

Luapan banjir lahar hujan pada musim hujan yang lalu telah mengakibatkan 898 rumah terendam dan jumlah penduduk yang dievakuasi sebanyak 5.734 jiwa yang tersebar di 47 RW. Luapan erupsi yang masuk Sungai Code akan menurunkan tingkat kenyamanan lingkungan serta memberikan dampak nyata pada turunnya keberhasilan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi dan perubahan yang konstruktif pada masyarakat di semua aspek kehidupan serta mengalami perubahan fundamental terhadap penurunan kualitas lingkungan.

Dari kajian sebelumnya ditemukan banyak faktor kerentanan yang menyebabkan masyarakat disekitar Sungai Code memiliki risiko bencana dari ancaman banjir lahar hujan misalnya :

1. Kekurangpedulian masyarakat terhadap kondisi sungai tersebut seperti

2. Kebijakan tata ruang dan administrasi pertanahan di bantaran Sungai Code dengan masih banyak dijumpai pendirian bangunan permanen baru disekitar sungai.
3. Tanah yang berada di sekitar sungai memiliki tingkat kestabilan yang rendah apalagi untuk bangunan rumah yang menjorok ke arah sungai.
4. Badan sungai yang digunakan sebagai aliran air akan mengalami penyempitan karena banyak aktivitas pembangunan yang menjorok ke arah sungai.
5. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang baik dan benar bagaimana masyarakat menyikapi kondisi Sungai Code untuk peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana.

Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penanggulangan bencana yang diperlukan di Kota Yogyakarta adalah kegiatan untuk mengantisipasi Banjir Lahar Hujan di Sungai Code Kota Yogyakarta. Menurut Sugeng Priyanto:

> "Khusus wilayah Kali Code dilakukan pemberlakuan pos pemantauan lima titik dari wilayah Ngentak. Hal ini, karena lima titik yang telah ditentukan tersebut merupakan titik-titik rawan terjadinya dampak banjir lahar yang mengkhawatirkan. Untuk wilayah sekitar Kali Code penduduknya kami berikan masing-masing kepala Camat dan Lurah alat komunikasi HT untuk memudahkan pengawasan wilayah Kali Code oleh kantor BKPBD".
>
> "Pemasangan EWS (*Early Warning System*) juga sangat membantu ketika peringatan akan ketinggian sungai sudah melebihi batas agar warga waspada. Penggunaan kedua sistem informasi ini sangat membantu proses awal

2. Ancaman Bencana Lahar Dingin

Berdasarkan analisis risiko bencana di wilayah Kota Yogyakarta dalam jangka pendek memiliki ancaman banjir lahar hujan pada sungai yang berhulu di Gunung Merapi yaitu di Sungai Code. Ancaman banjir lahar hujan diperkirakan terjadi saat musim hujan yang berdasarkan prakiraan BMKG akan mengalami puncaknya pada akhir Januari sampai dengan bulan Februari.

BPPTK memperkirakan material vulkanik Gunung Merapi yang dimuntahkan pada erupsi 5 November 2010 diperkirakan mencapai 140 juta M3. Saat hujan, material vulkanik tersebut mengalir bersama air hujan (dikenal sebagai lahar hujan) menuju ke bawah melalui aliran beberapa sungai antara lain Sungai Gendol, Sungai Kuning, Sungai Boyong, Sungai Krasak, dan Sungai Putih. Jumlah material vulkanik yang dialirkan selama musim hujan 2010/2011 diperkirakan mencapai 30% dari total material vulkanik yang ada.

Sungai Code merupakan kelanjutan dari Sungai Boyong yang merupakan salah satu alur tradisional aliran lahar hujan. Mitigasi struktural untuk mengurangi intensitas aliran lahar hujan telah dilakukan dengan pembuatan 54 unit Sabodam di sepanjang alur sungai ini. Sistem Sabodam tersebut cukup efektif mengurangi intensitas aliran lahar hujan Sungai Code sehingga banjir yang terjadi di Kota Yogyakarta pada awal tahun 2011 tidak mengakibatkan kerugian dan kerusakan yang berat. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak memperkirakan sistem Sabodam

unit Sabodam mengalami kerusakan berat saat menghadapi lahar hujan pada musim hujan 2010/2011 yang lalu. Sugeng Priyanto menjelaskan:

"Pemantauan utama terdapat mulai dari pos ngentak. Biasanya peringatan akan terjadinya bahaya lahar hujan akan diinformasikan setelah 40 menit lamanya arus banjir lahar melaju hingga kota Yogyakarta" (Hasil wawancara, 19 Maret 2012).

Berdasarkan kondisi terkini serta karakteristik ancaman banjir lahar maka diperkirakan banjir lahar hujan yang akan terjadi pada musim hujan periode 2011/2012 ini mengalami peningkatan intensitas yang cukup signifikan dibanding peristiwa banjir yang terjadi pada periode 2010/2011. Perencanaan yang dikembangkan dalam Rencana Kontinjensi ini adalah kejadian banjir lahar hujan di Sungai Code dengan intensitas kurang lebih 50% lebih besar dari kejadian banjir yang terjadi pada periode musim hujan 2010/2011. Kejadian banjir lahar terjadi sebagai berikut :

1. Ketinggian muka air di Pos Pemantau Ngentak mencapai 250 cm;
2. Banjir terjadi petang hari pada pukul 18.00 WIB.
3. Terjadi hujan lebat dan listrik mati di wilayah terdampak.
4. Terjadi pada akhir Januari sampai dengan awal Februari 2012.
5. Periode Tanggap Darurat 30 hari

3. Manajemen Komunikasi Bencana

4.1 Perencanaan (Kontijensi) Penanggulangan Bencana Lahar Hujan Oleh Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

Selama tahun 2011-2012 secara rutin BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) telah melakukan berbagai kegiatan rapat diskusi manajemen penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh dinas-dinas pemerintah, Sugeng Priyanto selaku Kepala Seksi Koordinator menjelaskan:

> " Kami biasanya melakukan kegiatan diskusi hingga pembahasan proses penanggulangan bencana khususnya lahar hujan Sungai Code setiap waktu, bukan lagi setiap hari. Hal tersebut juga termasuk pada bulan awal tahun 2012 ini tepatnya bulan Maret tanggal pastinya saya lupa. Intinya pertemuan itu dilakukan untuk menyamakan persepsi dan visi cara penanggulangan oleh seluruh dinas-dinas Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait" (Hasil wawancara, 19 Maret 2012).

Selengkapnya tabel-tabel yang menunjukan dinas-dinas terkait dalam rapat tersebut akan di cantumkan pada bagian lampiran penelitian ini. Hasil dari diskusi penyamaan persepsi untuk metode penanggulangan bencana lahar dingin akan di bahas pada bagian lampiran berikutnya.

4.2 Kebijakan Dan Strategi

Penanggulangan bencana dan pengungsi pada peristiwa banjir lahar hujan di Sungai Code Kota Yogyakarta dilaksanakan menurut kebijakan yang

universal dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan kebijakan dirumuskan strategi sebagai acuan masing-masing sektor dalam melaksanakan upaya penanganan bencana yang terjadi.

a. Kebijakan

1. Mengupayakan korban seminimal mungkin.
2. Memperhatikan nilai-nilai kebajikan dan kearifan lokal.
3. Memberikan penyelamatan dan perlindungan kepada masyarakat sesuai skala prioritas tanpa diskriminasi.
4. Memenuhi kebutuhan dasar secara realistis dan proporsional kepada korban dengan tetap memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan.
5. Memberdayakan segenap potensi yang ada dan menghindari terjadinya ego sektoral.
6. Melakukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, lembaga, dan dunia usaha dalam menggalang bantuan dengan tetap memperhatikan etika.
7. Menggratiskan biaya kesehatan bagi korban bencana selama tanggap darurat.
8. Menjamin tetap terselenggaranya Kegiatan Belajar Mengajar saat tanggap darurat bencana.

b. Strategi

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Pusdalops) dalam mengkoordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.

tempat pengungsian yang dilengkapi dapur umum dan sanitasi memadai dengan tetap memperhatikan kelompok rentan.

3. Memaksimalkan Puskesmas dan mengaktifkan Pos Kesehatan di wilayah terdampak untuk memastikan kesehatan pengungsi dan relawan.
4. Mengidentifikasi kebutuhan, menghimpun dan mendistribusikan bantuan dengan cepat dan tepat sasaran.
5. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang membutuhkan dan menyebarluaskannya melalui media cetak, dan elektronik.
6. Melakukan pengawasan penerimaan dan distribusi bantuan obat-obatan dan makanan (oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta).
7. Melakukan verifikasi dan updating data korban dan pengungsi setiap hari selama tanggap darurat.
8. Mengisolasi daerah yang mengalami bencana dengan menempatkan petugas.
9. Mengadministrasikan penerimaan dan penyaluran bantuan secara tertib dan akuntabel.

4.3 Manajemen dan Koordinasi

Kantor BKPBD Seksi Penanggulangan Bencana dan Linmas Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki SOP (standar operasional prosedur) dalam setiap langkah kegiatan penanggulangan bencana. Begitu juga ketika penanganan penanggulangan

Penanggulangan Bencana, Penugasan Tim Reaksi Cepat, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana, Evakuasi Korban Bencana, Monitoring Lokasi Bencana, dan Pusat Kendali Operasional (PUSDALOPS).

Pada prosedur proses koordinasi di lapangan ketika tahap tanggap darurat telah diterapkan sesuai prosedur yang ada, Sugeng P. sebagai kepala koordinator PKB Linmas menjelaskan:

> "Pertama semua dilakukan melalui SOP penanggulangan bencana yang telah ditentukan. Setelah seluruh perintah melalui Walikota diteruskan kepada anggota kantor BKPBD melalui Ketua Seksi Koordinasi, dilakukanlah kegiatan intervensi korban bencana, kerusakan, kebutuhan, kerugian. Nah, masing-masing poksi pemerintahan seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan kemudian memberikan kewajiban pembuatan laporan masing-masing sesuai taggung jawabnya. Setelah kemudian laporan diterima oleh Kantor BKPBD, baru melaksanakan pengerahan pasukan dengan rincian: pembagian tim, pembagian lokasi, persiapan sarana prasarana dan langsung masing-masing yang telah ditentukan menuju TKP untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana sesuai tugas masing-masing anggota. Anggota sendiri banyak terlibat seperti TNI/POLRI dan relawan-relawan dari seluruh wilayah" (Hasil wawancara, 19 Maret 2012).

Jika digambarkan proses koordinasi lapangan dalam penanggulangan bencana lahar hujan di wilayah Kali Code oleh kantor BKPBD Yogyakarta sebagai bagan 3.1 berikut (Sumber: Kantor BKPBD Kota Yogyakarta) :

Bagan 3.1: Standar Operasional Prosedur Kantor Penanggulangan Bencana

NO	Kegiatan	Staf PB Linmas/Staf Ops/ Petugas Radio	Kasi PB Linmas	Ka. PKB Linmas	Ketua BKPBD	Walikota
1	Informasi Kejadian Bencana					
2	Melaporkan ke Kasi PB Linmas akan adanya bencana					
3	Kasi PB Linmas melaporkan ke Ka PKB Linmas, Ketua BKPBD, Walikota					
4	Intervelasi: - Korban Bencana - Kerusakan - Kebutuhan - Kerugian					
	Pengerahan Pasukan: - Pembagian tim - Pembagian lokasi - Persiapan sarana prasarana - Menuju TKP Masuk ke mobil Rescue dan berangkat ke lokasi kejadian					

(Sumber : Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Derah Kota Yogyakarta)

Manajemen koordinasi yang dilakukan BKPBD dalam penanggulangan bencana dibagi dalam 5 sektor yang memeiliki peran masing-masing. Namun sebelumnya proses manajemen disesuaikan dengan koordinasi yang telah ditetapkan dalam SOP (standar operasional prosedur) kantor BKPBD. Sugeng Priyanto selaku

"Seluruh Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta semuanya terlibat dalam penanggulangan bencana, kami sebagai seksi koordinator penanggulangan bencana biasanya mendiskusikan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas-dinas pemerintah Yogyakarta untuk bersama-sama membuat suatu kebijakan penanggulangan bencana lahar hujan misalnya" (Hasil wawancara, 19 Maret 2012).

Baru kemudian setelah semua dikoordinasikan dengan semua pihak yang terlibat maka ditetapkan proses penanggulangan bencana masa tanggap darurat yang dibagi menjadi 5 sektor lapangan. Bentuk laporan mengenai data-data situasi, sasaran, kegiatan dan kebutuhan (data kebutuhan terdapat di halaman lampiran) yang telah ditentukan oleh dinas-dinas terkait biasanya di rangkum setelah mendapatkan oleh bagian seksi PB masing-masing dinas. Baru kemudian di berikan semua laporan tersebut ke kantor PKB Linmas kota Yogyakarta untuk ditindak lanjuti secara bersama-sama dengan seluruh pihak terkait. Sugeng Priyanto menjelaskan:

" Seluruh Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial memiliki tanggung jawab masing-masing. Mereka awalnya diwajibkan menyerahkan data-data laporan masing-masing sesuai tupoksinya. Misalkan Dinas Kesehatan memberikan laporan mengenai data jumlah warga yang masuk dalam golongan rentan saat bencana terjadi seperti balita misalnya, kemudian berapa jumlah balita yang ada, rentan usianya baru diambillah sebuah keputusan mengenai kebutuhan makanan atau susu atau kebutuhan lainnya yang diperlukan sesuai data di lapangan tadi".

" Semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klasifikasi tersebut seperti contoh balita tadi. Yang jelas, semua yang termasuk klasifikasi warga rentan merupakan tujuan evakuasi anggota dilapangan. Dengan penyediaan sarana dan prasarana pertolongan seperti mobil angkut warga yang kemudian membawa mereka ke tempat-tenpat pengungsian yang sudah ditentukan [illegible]"(Hasil wawancara, 19 Maret 2012)

1. Sektor Manajemen dan Koordinasi

a) Situasi

Banjir lahar hujan diperkirakan akan membuat keadaan dan situasi di wilayah terdampak tidak kondusif sehingga memerlukan penanganan bencana yang efisien dan terpadu. Fungsi ini dilaksanakan sepenuhnya pada sektor manajemen dan koordinasi yang juga merupakan pos komando (posko) tanggap darurat bencana.

b) Sasaran

a) Tergeraknya sumberdaya yang ada untuk melakukan tanggap darurat.

b) Tertanganinya korban dan pengungsi.

c) Terinventarisirnya kerugian dan korban yang ditimbulkan.

d) Teradministrasinya penerimaan dan penyaluran bantuan

c) **Kegiatan**

Tabel 3.1. Kegiatan-Kegiatan Sektor Manajemen dan Koordinasi

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Operasionalisasi Pusdalops	Kantor PKB & Linmas	365 hari
2	Aktivasi Pos Komando (POSKO)	Kantor PKB & Linmas, Dinas Kimpraswil, Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas Ketertiban, TNI, POLRI	Jika terjadi tanda-tanda bencana
3	Mengkoordinasikan kegiatan sektoral	Kantor PKB & Linmas, Dinas Kimpraswil, Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas Ketertiban, TNI, POLRI, PMI, Bag. TIT, Tapem Setda	Saat Tanggap Darurat
4	Membuat laporan penanganan bencana dan menginventarisasi seluruh kegiatan	Kantor PKB & Linmas, Dinas Kimpraswil, Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas Ketertiban, TNI, POLRI, Bag. Humas dan Protokol	Saat Tanggap Darurat
5	Pengamanan Wilayah	Linmas, POLRI, Dinas Ketertiban	Saat terjadi banjir, saat tanggap darurat

(Sumber : Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) Pemerintah Kota Yogyakarta)

2. Sektor SAR

a. Situasi

Untuk menekan jatuhnya korban maka personil dan peralatan pendukung SAR disiagakan selama 24 jam penuh selama musim hujan terjadi. Jumlah personil ditambah saat diakifkannya masa tanggap darurat. SAR segera diberangkatkan menuju 5 titik jembatan utama yang melintasi Sungai Code jika kondisi menunjukkan indikasi akan terjadinya banjir. Indikator yang dipakai adalah informasi ketinggian

b. Sasaran

Sektor SAR bertanggung jawab dalam melakukan operasi penyelamatan dan pencarian korban bencana. Sasaran Sektor SAR adalah meminimalkan korban bencana. Untuk itu sektor ini bersiaga 24 jam saat musim hujan ketika ada potensi banjir.

c. Kegiatan

Tabel 3.2. Kegiatan Sektor SAR

No	Kegiatan	Pelaksana	Peserta	Waktu
1	Aktivasi Sistem Radio Komunikasi	Kantor PKB & Linmas, Dinas Ketertiban, TNI, POLRI, PMI, Komunitas	100 orang	150 hari
2	Aktivasi Pos Siaga 5 titik 1. Jemb. Sardjito Lama 2. Jemb. Gondolayu 3. Jemb. Jambu 4. Jemb. Sayidan 5. Jemb. Tungkak	Kantor PKB & Linmas, TNI, POLRI, PMI, SAR Linmas	64 orang	Saat Ada Potensi
3	Operasi Penyelamatan dan Pertolongan	Kantor PKB & Linmas, SAR LINMAS, YES 118, PMI, TNI, POLRI, Komunitas/Masyarakat	100 orang	Saat terjadi banjir

(Sumber : Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) Pemerintah Kota Yogyakarta)

3. Sektor Sarana Prasarana

a) Situasi

Apabila terjadi bencana banjir lahar hujan akibatnya adalah terjadinya gelombang pengungsian karena kepadatan penduduk di kawasan daerah aliran sungai Code. Pengungsi sejumlah 12.647 jiwa berada di titik pengungsian dan 291 jiwa diantaranya mengalami luka-luka.

Banjir lahar hujan diperkirakan akan menyebabkan bangunan, jalan,

Beberapa sarana dan prasarana vital yang rusak akibat diterjang banjir harus diperbaiki dengan segera sehingga dapat berfungsi kembali. Sektor sarana prasaran juga bertanggung jawab untuk menyediakan sarana pengangkutan dan tempat pengungsian sesuai persyaratan.

b) Sasaran

a) Terangkutnya semua pengungsi ke lokasi titik kumpul yang telah disiapkan.

b) Terangkut/terdistribusikannya bantuan pangan dan non pangan untuk pengungsi sampai ke lokasi titik kumpul.

c) Terpulihkannya Sarana dan Prasarana seperti transportasi, kesehatan, gedung Pemerintahan / Sekolah, dan MCK.

d) Penyediaan sarana-prasarana pada tempat pengungsian memadai seperti

c) **Kegiatan**

Tabel 3.3. Kegiatan Sektor Sarana & Prasarana

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Menyiapkan armada Transport Evakuasi	TNI, POLRI, BLH, DBGAD, Dinas Perhubungan, Dinas Kimpraswil, Dinas Ketertiban, Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta, Kecamatan	Saat bencana
2	Pemulihan fungsi sarana-prasarana umum	Dinas Kimpraswil, Dinas Ketertiban, Kantor PKB Linmas, BLH, PLN, PDAM, Dinas Kesehatan, DBGAD	Saat Tanggap Darurat
3	Penyediaan Sarana - prasarana tempat pengungsian, Pos Kesehatan, dan Dapur Umum	Dinas Kimpraswil, Dinas Ketertiban, Kantor PKB Linmas, Dinas Sosnakertrans, Dinas Kesehatan, TNI, PLN, PDAM	Setelah adanya tanda-tanda bencana

(Sumber : Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) Pemerintah Kota Yogyakarta)

4. Sektor Kesehatan

a) Situasi

Apabila terjadi bencana Banjir Lahar Hujan di Sungai Code Kota Yogyakarta, diperkirakan akan terdapat penduduk yang menderita luka-luka sebanyak 291 orang yang terdiri dari 15 orang luka-luka berat, 73 orang luka sedang (luka robek) dan 203

Untuk menjamin kesehatan pengungsi maka dipersiapkan pos kesehatan sejumlah 16 unit yang tersebar di seluruh wilayah terdampak. Pos kesehatan beroperasi 24 jam penuh selama tanggap darurat bencana. Pos kesehatan yang diaktifkan sanggup melayani jumlah pengungsi yang diperkirakan mencapai 12.647 orang.

b) Sasaran

a) Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi korban

b) Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi pengungsi

c) Terlaksananya rujukan kesehatan secara optimal

c) Kegiatan

Tabel 3.4. Kegiatan Sektor Kesehatan

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Mengaktifkan Tim Kesehatan Darurat a. Tim reaksi cepat pelayanan kesehatan b. Tim penilaian cepat kesehatan	Dinkes Kota Yogyakarta, RS Jogja, PMI, Yes 118	Hari pertama kejadian
2	Menyiapkan paket obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan	Dinkes Kota Yogyakarta, RS Jogja, Yes 118	Selama Tanggap Darurat
3	Membentuk pos kesehatan	Dinkes Kota Yogyakarta, RS Jogja, PMI, Yes 118	Hari pertama kejadian
4	Mengaktifkan Puskesmas dan pos pelayanan kesehatan di titik kumpul selama 24 jam	Dinkes Kota Yogyakarta, RS Jogja, PMI, Yes 118	Selama Tanggap Darurat
5	Menyiapkan ambulance	Dinkes Kota Yogyakarta, RS Jogja, PMI, Yes 118	Selama Tanggap Darurat
6	Pelayanan rujukan	Dinkes Kota Yogyakarta, RS Jogja, Yes 118	Selama Tanggap Darurat

(Sumber : Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) Pemerintah Kota Yogyakarta)

5. Sektor Logistik

a) Situasi

Terjadi banjir lahar hujan mengakibatkan 12.647 jiwa terdiri dari 291 jiwa mengalami luka-luka dan 12.356 jiwa berada dititik kumpul. Dengan rincian kelompok rentan sebanyak 297 bayi (0-1th), 739 balita (1-5 th), 1.129 anak-anak (6-12th), 1.283 lansia (>60th), 85 difabel dan kelompok potensial 7.603 dewasa, dan 1.616 usia 13-16th.

Pemenuhan kebutuhan sektor logistik di distribusikan ke 8 kecamatan terdampak. Distribusi ke titik kumpul merupakan tanggungjawab kecamatan tersebut. Kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi anak usia TK dan SD dilaksanakan pendidikan darurat di lokasi pengungsian.

b) Sasaran

a) Terlayaninya semua kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari balita sampai kepada orang tua

b) Terlaksananya penerimaan, penyortiran dan pendistribusian logistik dengan baik.

c) Terselenggaranya pendidikan darurat.

c) Kegiatan

Kegiatan dapur umum bertugas untuk melayani para korban, petugas pertolongan kedaruratan dalam bencana banjir lahar hujan terdiri dari: BKPBD, TNI,

Pelayanan selama 30 hari sesuai dengan kebutuhan

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah :

Tabel 3.5. Kegiatan Sektor Logistik

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Dapur umum	Dinas Sosnakertrans, TNI, Tagana	Sesaat setelah terjadi bencana
2	Menghimpun Bantuan	Dinsosnakertrans, PKB & Linmas, Dinas Kimpraswil	Tanggap darurat
3	Menyortir dan Memeriksa bantuan	Dinsosnakertrans, PKB & Linmas, Dinas Kimpraswil, Dinas Kesehatan	Tanggap darurat
4	Distribusi bantuan	Dinsosnakertrans, PKB & Linmas, Dinas Kimpraswil, Dinas Ketertiban, Dinas Perhubungan	Tanggap darurat
5	KBM di lokasi pengungsian	Dinas Pendidikan	Selama Tanggap Darurat
6	Psiko-Sosial	Dinas Sosnakertrans, Dinas Kesehatan, Komunitas, Relawan,	

(Sumber : Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD)

4.4 Manajemen Informasi

Kantor Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki misi seperti yang tertera pada visi misi kantor tersebut. Salah satu misi yang ingin dicapai adalah mengembangkan sistem informasi antisipasi bencana. Ini berarti kantor BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) belum memiliki sistem informasi yang maksimal untuk penanggulangan bencana di kota Yogyakarta khususnya. Selain itu ditegaskan juga dalam salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kantor BKPBD adalah manajemen informasi yang belum ditunjang dengan sistem informasi bencana maupun kebakaran sehingga kebijakan keselamatan belum didukung dengan data dan informasi yang akurat (pernyataan tersebut terdapat pada dokumen Rancangan Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Penanggulangan Kebakaran Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016).

Namun, BKPBD telah menerapkan paling tidak manajemen informasi dalam proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan yang cukup vital bagi kegiatan antisipasi bencana mulai dari masa pra bencana (peringatan dini, sosialisasi ke masyarakat) hingga masa tanggap darurat (penggunaan alat komunikasi).

Untuk memaksimalkan manajemen informasi bencana lahar hujan Kali Code, BKPBD telah menerapkan manajemen informasi berupa teknologi dengan menggunakan alat-alat komunikasi yang ada kepada masyarakat terdampak bencana

lahar hujan di Kali Code. Alat komunikasi yang diterapkan seperti HT dan EWS (*Early Warning System*) di 5 titik posko mulai dari pos pengamatan Ngentak.

EWS merupakan bentuk pelayanan yang diberikan berupa alat peringatan dini bagi masyarakat Kali Code untuk penanggulangan bencana lahar hujan. Tujuannya adalah mengantisipasi kalau sewaktu-waktu ketinggian air sungai berpusat dari daerah merapi terun menuju ke pos pengamatan Ngentak telah melebihi batas ketinggian maksimal air. Peringatan langsung di informasikan melalui alat komunikasi HT kepada warga sekitar bantaran Kali Code yang berpotensi terkena banjir lahar hujan. Warga sekitar Kali Code sendiri memiliki waktu selama 40 menit sejak air sungai berupa arus lahar dingin meluncur melewati pos pengamatan di Ngentak menuju kota Yogyakarta khususnya wilayah Code.

Paralatan komunikasi HT misalkan diberikan kepada masing-masing kepala Camat dan Lurah. Hal ini berfungsi sebagai pengiriman informasi mengenai ketinggian air sungai kepada kantor BKPBD yang disampaikan melalui PUSDALOPS (semacam pemantauan informasi berbasis frekuensi radio). Sugeng Priyanto menjelaskan:

> "Pembekalan dilakukan masing-masing Lurah, Camat dengan memberikan fasilitas HT. Meskipun fungsinya belum maksimal, namun pengiriman gelombang frekuensi melalui horn di setiap titik pos akan sangat berguna bagi penyampaian informasi mengenai gambaran bencana lahar hujan yang akan terjadi beberapa waktu kedepan" (Hasil wawancara, 19 Maret 2012).

> "Kemudian pada dinas-dinas terkait tersebut kita suruh untuk membuat masing-masing laporan sesuai keterkaitan dengan dinasnya. Misalkan, Dinas Kesehatan membuat laporan mengenai kelompok pengungsi dan orang-orang

yang perlu diadakan bagi mereka" (Hasil wawancara, 19 Maret 2012).

Sugeng Priyanto menambahakan:

> "Bahkan peralatan seperti sepatu boot, senter, hingga mantel pun kami berikan kepada masyarakat agar ikut membantu pemantauan disetiap posko, misalkan pemberitahuan : Diharapkan waspada ketinggian air sungai telah mencapai ambang batas" (Hasil, wawancara 19 Maret 2012).

> "Pada tahap awal BKPBD juga menggunakan sistem EWS guna memberikan peringatan dini kepada masyarakat untuk mewaspadai bencana lahar hujan yang akan terjadi setelah 40 menit meluncur dari pos ngentak sendiri hingga mencapai wilayah Code, maka dari itu warga memiliki waktu selama 40 menit untuk kegiatan antisipasi bencana sebelum terjadi" (Hasil wawancara, 19 Maret 2012).

Berikutnya bentuk manajemen informasi atau pengolahan informasi yang efektif kepada masyarakat Kali Code berupa kegiatan sosialisasi rutin yang dimulai sejak tahun 2009 lalu pada saat erupsi Merapi mulai menimbulkan keresahan masyarakat kota Yogyakarta. Sosialisasi merupakan langkah kegiatan kontinyu yang selalu dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta. Hal ini terkait dengan edukasi warga yang berpotensi terkena dampak bencana. Hal ini bertujuan agar kedepannya masyarakat Kali Code mampu memahami cara penanggulangan bencana secara mandiri mulai dari persiapan masa pra bencana sampai masa tanggap darurat .

Sosialisasi tersebut merupakan hasil inisiatif warga Kali Code yang menginginkan Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan kagiatan sosialisasi rutin kepada mereka. Warga mengharapkan sosialisasi sebagai proses transfer informasi mengenai kebencanaan khususnya bencana lahar hujan yang seringkali menimpa

wilayah mereka yakni Kali Code. Warga bahkan menurut Sugeng Priyanto selaku Kepala Seksi Koordinasi Penanggulangan Bencana, sering kali menggunakan dana swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diadakan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dinas Penanggulangan Kebakaran Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Seksi Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat juga merencanakan akan mewujudkan program "Desa Tangguh Bencana" di wilayah kota Yogyakarta. Program ini akan terealisasikan pada tahun 2012 ini setelah anggaran APBN pemerintah turun. "Desa Tangguh Bencana" merupakan program yang diharapkan akan memberi edukasi kepada masyarakat desa di melalui kegiatan sosialisasi kepada warga desa kota Yogyakarta. Tujuannya juga merupakan langkah pengenalan antisipasi bencana yang sewaktu-waktu dapat menimpa wilayah mereka. Dengan begitu mereka lebih siap dan diharapkan mampu meminimalisir bahkan meniadakan dampak kerugian yang bisa ditimbulkan oleh bencana yang ada. Sugeng Priyanto menjelaskan:

> "Sosialisasi dilakukan biasanya di halaman pelatihan kantor BKPBD Yogyakarta. Bahkan kegiatan sosialisasi semacam ini merupakan permintaan warga Kali Code sendiri agar diberikan edukasi tanggap bencana. Mereka juga kerap Kali mengadakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan BKPBD untuk memberikan pelatihan-pelatihan tanggap bencana dan gladi posko seperti yang dilakukan pada tanggal 1-15 Desember 2011 lalu dengan menggunakan dana swadaya masyarakat sendiri. Ini menandakan bahwa kepedulian warga Kali Code terhadap bencana sudah sangat bagus. Dan untuk ke depannya BKPBD sendiri akan mensosialisasikan "Desa Tangguh Bencana" pada tahun 2012 ini" (Hasil wawancara, 19 Maret 2012)

4.5 Evaluasi dan Audit Manajemen Bencana BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah)

Evaluasi juga merupakan bagian dari sistem manajemen informasi bencana berikutnya di kantor BKPBD Kota Yogyakarta. Manajemen informasi seperti ini dilakukan dengan proses audit saat pasca bencana. Audit merupakan suatu upaya untuk mengevaluasi penerapan manajemen bencana dalam suatu organisasi, apakah sudah sesuai atau telah memenuhi persyaratan atau tolok ukur yang ditetapkan (Ramli, 2010:67).

Audit bencana dilakukan secara berkala dan oleh pihak BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah). Dari hasil audit, selanjutnya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem manajemen bencana dalam konteks informasi untuk melakukan perencanaan awal pada penanganan manajemen penanggulangan bencana di waktu mendatang. Sugeng Priyanto menjelaskan bahwa:

> " Biasanya kami mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi hasil kerja kami, biasanya tiap akhir tahun mas, dibarengi dengan penutupan anggaran setiap tahunnya di bulan Desember. Bahan evaluasi tersebut namanya audit manajemen bencana BKPBD. Dan pada akhirnya evaluasi itu akan dimasukan sebagai dasar pembuatan perencanaan awal yang kita sebut sebagai kontijensi di awal tahun. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya BKPBD belum pernah membuat perencanaan awal/kontijensi, baru pada tahun 2012 ini akan dibuat terinci benar-benar sebuah perencanaan awal/kontijensi tadi. Biasanya kalau dulu kita hanya berdasarkan laporan-laporan yang tidak terlalu rinci dari seluruh dinas-dinas terkait dalam penanganan penanggulangan bencana lahar

B. PEMBAHASAN

1. Manajemen Komunikasi Dan Koordinasi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) Pemkot Yogyakarta.

Manajemen (*management*) adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi (Daft, 2008:6). Manajemen yang diterapkan oleh kantor BKPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kota Yogyakarta juga melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya organisasi.

Penanganan bencana yang mengacu kepada peraturan, jika ditinjau dari aspek legal, memang dapet dipertanggungjawabkan. Maka peran komunikasi dalam penyampaian informasi secara cepat, merupakan salah satu jalan untuk mendukung penanganan bencana dari tahun ke tahun.

Myers dan Myers (Susanto dalam Budi 2011:14) berpendapat, bahwa komunikasi dimaksudkan untuk berbagi informasi dan mengurangi kekakuan dalam organisasi. Jadi, komunikasi dapat menciptakan suatu keadaan yang fleksibel dalam pelaksanaan kegiatan organisasi tanpa harus melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang ada.

Pada saat pra bencana,menurut pasal 34, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimaa dimaksud dalam pasal 33 huruf a

Sedangkan pada masa tanggap bencana, diperlukan komunikasi yang baik guna menjamin kelancaran upaya penanggulangan. Komunikasi diperlukan dalam sistem manajemen bencana mulai dari proses perencanaan, mitigasi, tanggap darurat sampai rehabilitasi (Ramli, 2010:65).

Ketika membangun sistem manajemen bencana, sistem komunikasi tersebut telah disusun oleh BKPBD dan ditetapkan baik mengenai cara, sistem, prosedur maupun sarananya. Seperti, mengkomunikasikan adanya bencana kepada masyarakat melalui alat komunikasi HT yang disampaikan oleh anggota tim yang berjaga di lima titik pos pemantau dengan menggunakan alarm berupa alat EWS (*Early warning system*). Kemudian, informasi itu berdasarkan pengamatan bahwa ketinggian air Sungai Code telah melebihi batas. Terus saluran informasi ini sampai kepada masyarakat Kali Code dengan koordinator Kepala Camat dan Lurah setempat yang telah dibekali alat komunikasi HT. Langkah selanjutnya adalah tindakan antisipasi sebelum bencana lahar hujan sampai ke wilayah mereka hingga situasi saat tanggap darurat.

Brikutnya adalah proses manajemen bencana yang diterapkan oleh BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) Pemerintah Kota Yogyakarta mulai dari tahap perencanaan hingga masa tanggap darurat.

Langkah awal dalam manajemen komunikasi penanggulangan bencana yang dilakukan kantor BKPBD adalah melakukan perencanaan (Kontijensi) dan penilaian

a. Identifikasi Resiko Bencana (Disaster Risk)

Sistem manajemen bencana yang pertama adalah identifikasi dan penilaian resiko bencana. Identifikasi bencana mutlak diperlukan sebelum mengembangkan sistem manajemen bencana. Tanpa mengetahui apa jenis dan seberapa besar bencana yang akan dihadapi, maka upaya penanggulangan bencana akan sulit dilakukan dengan baik.

Menurut PP No. 21 tahun 2008, resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, dan gangguan kegiatan masyarakat (Ramli, 2010:41).

Penilaian resiko bencana merupakan tahap awal sebelum menentukan langkah manajemen penanggulangan bencana. Tujuannya adalah agar mengetahui seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana itu nantinya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana lahar hujan sendiri.

Tingkat resiko yang ditimbulkan oleh bencana lahar hujan di Kali Code tahun 2011 berbeda dengan tahun sebelumnya 2008, 2009 dan 2010. Pada tahun 2011 terjadi pengurangan dampak kerugian material maupun korban jiwa. Hal inilah yang menjadikan indentifikasi resiko bencana dari tahun ketahun menjadi sangat penting

Penilaian resiko bencana untuk mengetahui apakah potensi suatu bencana di suatu daerah pada kasus ini adalah wilayah Kali Code tergolong tinggi atau rendah. Seperti bencana lahar hujan 2011 lalu memiliki potensi yang sama besar atau tidak dengan bencana lahar hujan yang pernah terjadi di tahun sebelumnya. Namun dengan adanya proses manajemen yang di awali dengan penilaian resiko bencana sebelumnya, tentu setiap kemungkinan terjadinya bencana akan selalu berbeda. Begitulah yang disimpulkan oleh BKPBD, karena sudah ada manajemen bencana yang memprioritaskan mana penanganan bencana yang harus di tangani terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa resiko bencana yang dilakukan maka kantor BKPBD melakukan langkah penyusunan analisa resiko bencana yang terinci dan mendasar untuk selanjutnya dikembangkan program kerja penerapannya. Hasil tersebut diwujudkan dalam bentuk daftar resiko bencana (*disaster risk register*) yang terdokumentasi dan disimpan baik di Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil daftar resiko bencana ini sebaiknya dikomunikasikan kepada semua pihak khususnya masyarakat yang terkena resiko.

Dengan demikian, setiap elemen dalam masyarakat dapat mengetahui apa saja resiko bencana yang ada di lingkungannya masing-masing dan apa langkah pengendalian yang akan ditetapkan. Hasil identifikasi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengatur tata ruang, dengan sistem yang dapat meminimalisir dampak [illegible] sesuai dengan resiko yang akan ditimbulkannya.

Namun, BKPBD belum maksimal dalam mengkomunikasikannya hasil identifikasi resiko bencana kepada masyarakat. Karena BKPBD masing menggunakan media sosialisasi yang terbilang manual dan monoton, tidak ada pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif. Kendala pemahaman masyarakat Kali Code mengenai penilaian resiko bencana masih minim. Sebab, masyarakat masih memiliki paradigma bahwa penanggulangan bencana lebih terfokus pada masa tanggap darurat atau ketika bencana itu terjadi.

Selain itu, kegiatan komunikasi penilaian resiko bencana hanya dilakukan intens kepada pihak internal kantor BKPBD dan dinas-dinas Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan bentuk pengambilan tindakan penanggulangan bencana yang didasarkan pada hasil identifikasi resiko bencana hanya dipahami oleh pengambil kebijakan penanggulangan bencana sendiri. Komunikasi yang dilakukan hanya terkait dengan pengadaan perbaikan maupun sarana pencegahaan atau pengurangan resiko bencana di wilayah terdampak khususnya Kali Code. Seperti yang telah dilakukan pembuatan sabodem di pinggiran Sungai Code untuk pengalihan arus sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga Code, akibat penuhnya aliran sungai yang melewati Sungai Code di kota Yogyakarta.

Kerugian fisik akibat becana lahar hujan sepanjang tahun 2011 lalu dapat di bangun kembali. Namun dampak traumatik, kehilangan tempat tinggal sementara

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui BKPBD melakukan identifikasi resiko bencana yang memiliki peran penting sebelum membangun kembali sarana dan prasarana yang terkena dampak lahar hujan serta pengambilan keputusan dan tindakan pada masa tanggap becana. Namun, diharapkan yang menjadi fokus utama adalah pemberian edukasi kepada warga masyarakat Kali Code yang juga menginginkan adanya bentuk kerjasama pemerintah kota Yogyakarta untuk mampu memberikan pelatihan serta edukasi tanggap bencana kepada warga. Tujuannya adalah agar pengetahuan kebencanaan di masyarakat menjadi paham dan menjadikan mereka warga yang cerdas ketika bencana menimpa. Langkah seperti sosialisasi biasanya dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga lingkungan wilayah mereka sendiri.

Pentingnya sosialisasi yang menjadi kunci utama bagi BKPBD dalam melakukan langkah komunikasi efektif kepada warga Code, merupakan langkah awal pencegahan terjadinya bencana dan langkah untuk meminimalisir dampak bencana dikemudian hari. Sehingga, masyarakat semakin menyadari bahwa mereka sendirilah yang memegang peranan penting dalam pencegahan terjadinya bencana. Pencegahan sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Berikutnya berkaitan dengan kesadaran masyarakat juga menjadi tujuan dalam tahap manajemen bencana selanjutnya, kesadaran masyarakat ini dibangun agar mampu meningkatkan upaya serta [illegible] bencana akan terjadi, apa saja yang akan dilakukan. Selain itu

pembangunan fisik yang terdapat di wilayah rawan bencana tersebut, mulai dari jembatan, tanggul hingga bangunan seperti posko-posko pemantau bencana lahar hujan di Kali Code.

Jadi, analisis resiko bencana merupakan analisis bagaimana akan terjadinya bencana dan kerugian yang akan ditimbulkan. Kerugian tersebut bisa berupa kerugian fisik bangunan hingga kerugian secara sosial berupa keadaan mental penduduk yang terkena dampak bencana. Hilangnya rasa aman, orang-orang yang mengungsi menjadi banyak, kerusakan dan kehilangan dan bahkan gangguan terhadap kegiatan masyarakat. Wilayah Kali Code yang telah dilakukan tahap analisis resiko bencana oleh BKPBD, maka dapat dibuatkan skala prioritas mana daerah yang harus diantisipasi dan dilakukan upaya mitigasi bencana, agar nilai resiko dapat diminimalisir. Sebab, sifat bencana aadalah akan terulang kembali pada masa yang akan datang.

Kantor BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) mengungkapkan melalui Ka. Seksi Penanggulangan Bencana Sugeng Priyanto bahwa pihaknya telah selalu mengingatkan warga di wilayah Kali Code untuk tanggap bencana. Bahkan dalam beberapa waktu kedepan program BKPBD yang akan dilakukan adalah "Desa Tangguh Bencana" juga berkaitan dengan tujuan memberikan edukasi warga desa agar mampu meminimalisir bencana yang akan menimpa wilayah mereka sewaktu-waktu.

Cara penanggulangan bencana yang berparadigma lama seperti memandang masyarakat merupakan objek korban bencana harus dirubah menjadi masyarakat merupakan alasan dan penyebab terjadinya bencana itu sendiri. Maka, bentuk kerja sama antara Pemerintah kota Yogyakarta dengan warga Kali Code akan mampu meminimalisir bencana dikemudian hari.

Hal ini sejalan dengan yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

b. Perencanaan Awal dan Kontijensi

Berikutnya dalam sistem manajemen bencana oleh BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) Pemerintah Kota Yogyakarta adalah perencanaan awal (*preplanning*) yang disusun berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian resiko bencana sebelumnya.

Atas dasar berbagai potensi bencana (lahar hujan) disusun suatu sekenario awal bencana lahar dingin di Kali Code. Dari perencanaan awal BKPBD dapat diketahui atau disusun rencana strategi penanganan bencana, sumberdaya yang tersedia dan yang dipersiapkan untuk menangani bencana serta organisasi yang

Perencanaan awal BKPBD terhadap bencana lahar hujan Kali Code akan membantu manajemen dalam merancanag sistem manajemen bencana yang tepat dan sesuai di lapangan pada nantinya. Perencanaan awal ini sering disebut BKPBD sebagai kontijensi.

Rencana kontinjensi lahir dari proses perencanaan kontinjensi. Proses perencanaan tersebut melibatkan sekelompok orang atau organisasi yang bekerjasama secara berkelanjutan untuk merumuskan dan mensepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan tanggung jawab dan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak.

Dokumen rencana kontijensi ini disusun sebagai pedoman penanganan bencana banjir lahar hujan pada saat tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stake holder*) pada saat tanggap darurat bencana.

Dokumen rencana kontijensi ini bersifat :

1. Partisipatif, disusun oleh multi sektor dan multi pihak
2. Dinamis dan selalu terbarukan

Ruang lingkup cakupan luasan ancaman banjir lahar hujan dalam rencana kontijensi ini dibatasi oleh batas administrasi di wilayah kota Yogyakarta yang berada

Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Mergangsan, Umbulharjo), yang meliputii 14 Kelurahan (Karangwaru, Gowongan, Cokrodiningratan, Terban, Kotabaru, Suryatmajan, Tegalpanggung, Purwokinanti, Prawirodirjan, Ngupasan, Wirogunan, Keparakan, Brontokusuman, Sorosutan).

Aktivasi rencana kontijensi dilaksanakan setelah terdapat tanda-tanda peringatan dini akan datangnya ancaman banjir lahar hujan dari peralatan *Early Warning System* (EWS) berdasarkan pantauan cuaca maupun hasil pengamatan ketinggian muka air di Sungai Code kota Yogyakarta.

Kontijensi sendiri dilakukan oleh BKPBD dengan seluruh dinas-dinas Pemerintah Kota Yogyakarta yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana lahar hujan di Kali Code (daftar profil dinas terdapat pada halaman lampiran). Rapat diskusi penyamaan persepsi dan misi dalam penanggulangan bencana dilakukan pada bulan tiap bulan Maret setelah anggaran pemerintah untuk dana penanggulangan bencana turun pada bulan Januari atau Februari.

Kegitan kontijensi yang dilakukan BKPBD merupakan kegiatan yang baru dilakukan sekali selama pelaksanaan perencanaan awal penanggulangan bencana lahar hujan Kali Code, yaitu pada tahun 2012 untuk mengantisipasi bencana lahar hujan di tahun 2012. Pada tahun sebelumnya 2008, 2009 dan 2010 belum pernah dilakukan perencanaan kontijensi yang sangat terinci dan matang seperti tahun 2012.

berkat kerjasama antara BKPBD dengan dinas - dinas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyamaan persepsi penanggulangan bencana lahar hujan seluruhnya.

Padahal, jika dilihat bagaimana kejadian bencana lahar hujan tahun-tahun sebelumnya sejak 2008 hingga 2010, dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian material dan korban manusia lebih besar ketimbang di tahun 2011 ini. Seharusnya pemahaman mengenai kematangan perencanaan kontijensi sudah bisa dilakukan pada sejak tahun 2008 disaat bencana lahar hujan sangat berdampak pasca erupsi Merapi 2006 dan 2010.

Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan kontijensi yang dilakukan Kantor BKPBD dengan mendiskusikannya kepada seluruh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Hanya saja absensi kehadiran pihak-pihak terkait ketika diadakannya pertemuan untuk pembahasan kontijensi, seringkali menjadi pemicu lambatnya pendataan kegiatan hingga bantuan yang akan ditetapkan menjadi hal yang sedikit mengganggu pelaksanaan kontijensi.

Berdalih pelaksanaan kontijensi pada tahun-tahun lalu BKPBD hanya sebatas perencanaan namun tidak sematang dan terinci dengan baik seperti kontijensi 2012 ini, sudah cukup untuk sebagai dasar penanganan penanggulangan bencana kedepannya. Namun, dengan melihat adanya progress yang sudah lebih baik mengenai perencanaan kontijensi yang dilakukan ditahun 2011 untuk mengantisipasi bencana tahun 2012 nanti, sekiranya BKPBD akan terus menjadikan perencanaan

koordinasi dan juga pengorganisasian yang lebih terencana baik kedepannya untuk mengantisipasi bahkan maminimalisir dampak bencana lahar hujan yang lebih besar.

Pada konteks rencana kontijensi ini masyarakat harus diposisikan sebagai subyek, bukan lagi objek dalam penanggulangan bencana, sehingga mereka mengetahui ancaman di wilayahnya dan mampu meningkatkan kapasitas menghadapi ancaman melalui program penanggulangan bencana berbasiskan masyarakat. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan penegndalian bencana dengan aturan khusus dalam kondisi darurat, yang bisa memangkas birokrasi pemberian bantuan dan mempersingkat proses komunikasi menjadi pola komunikasi yang integratif dalam waktu cepat.

c. Pengorganisasian

Berikutnya dalam sistem manajemen bencana BKPBD adalah organisasi dan tanggung jawab. Penanganan bencana tidak akan berhasil dengan baik jika tidak di ikuti dengan sistem organisasi yang baik pula. Baik dalam arti efektif dan strategis dalam setiap kedudukan di dalam ruang lingkup Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Derah Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk itu penerapan kedudukan organisasi yang sejatinya dibentuk melalui Peraturan Pemerintah mampu memiliki peran-peran yang strategis agar penanganan penanggulangan yang melalui manajemen

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan pembagian kerja ke dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya beserta penetapan dengan cara-cara yang tepat mengenai orang-orangnya (*staffing*) yang harus menduduki fungsi-fungsi itu berikut penentuannya dengan tepat tentang hubungan wewenang dan tanggunng jawab (Lestari dalam Budi [ed], 2011:95).

Organisasi menajemen menjadi landasan penanganan bencana di lingkungan masing-masing khususnya wilayah Kali Code. Oleh karena itu, salah satu elemen penting dalam sistem manajemen bencana adalah penetapan organisasi dan tanggung jawab yang jelas.

Di setiap level organisasi BKPBD kota Yogyakarta, telah dibentuk organisasi tanggap darurat yang bentuk, struktur dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan atau potensi resiko bencana yang dihadapi.

BKPBD melakukan pengorganisasian dengan tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapun tujuan strategik Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Derah Kota Yogyakarta yaitu meningkatkan pelayanan bencana secara tanggap, cepat dan tepat untuk meminimalkan korban jiwa dan harta benda. Oleh karena itu dibentuklah organisasi berdasarkan kepegawaiannya

[illegible] tabel 3.2 berikut (Sumber: Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana

Tabel 3.6. Keterangan Kepegawaian Kantor Penanggulangan Kebakaran Bencana dan Linmas Pemerintah Kota Yogyakarta

NO	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Kantor	1	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1
3	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengawasan Kebakaran	1	1
4	Kepala Seksi Operasional Kepala Seksi	1	1
5	Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	1	1
6	Staf Sub Bagian Tata Usaha	10	PNS
7	Staf Seksi Pencegahan dan Pengawasan Kebakaran	5	PNS
8	Staf Seksi Operasional	42	PNS
9	Staf Seksi Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	6	PNS

Pembagian seksi penanggulangan bencana (lahar hujan) terpisah dengan bagian penanggulangan kebakaran. Hal ini agar pembagian tata kerja dan tanggung jawab dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Seksi staf penanggulangan bencana bertugas mengkoordinasi seluruh pihak yang memiliki peran dalam proses manajemen penanggulangan bencana.

Kemudian untuk membantu penanganan penanggulangan bencana lahar

menjadi 5 sektor yang memiliki fokus penanganan dan kegiatan yang berbeda masing-masingnya. 5 sektor tersebut dibagi yaitu: Sektor manajemen dan koordinasi, Sektor SAR, Sektor prasaranan dan sarana, Sektor Kesehatan dan Sektor Logistik. Kelima sektor ini memiliki fokus kegiatan, sasaran, dan kebutuhan masing-masing yang telah direncanakan.

Lima Sektor tersebut berdasarkan hasil diskusi seluruh dinas pemerintah kota Yogyakarta untuk menyamakan persepsi dalam penanggulangan bencana. Misalkan, Dinas Kesehatan dan Sosial memiliki peran penting sesuai tugasnya seperti bagian pemenuhan kebutuhan penduduk dan pengungsi warga Kali Code yang terkena dampak bencana hingga warga rentan seperti balita, manula, perempuan, dan orang cacat. Penanganan khusus balita biasanya diutamakan dalam pemenuhan kebutuhan pangan seperti susu balita. Sedangkan bagi manula dan orang cacat lebih diutamakan seperti peralatan penunjang kesehatan.

Ini sejalan dengan PP No. 11, langkah-langkah yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat antara lain:

langkah dan tindakan lanjutan dalam tanggap darurat, karena kemungkinan besar bencana tersebut menimbulkan korban yang bisa segera ditemukan, namun ada pula korban yang terperangkap atau tertimbun reruntuhan. Sehingga diperlukan upaya penyelamataan:

4) Pemenuhan kebutuhan dasar

Kebutuhan tersebut berupa pangan dan papan, karena pada kondisi ini biasanya semua insfrastruktur mengalami kerusakan.

5) Perlindungan terhadap kelompok rentan

Prioritas penyelamatan ini ditunjukan kepada anak-anak, para penyandang cacat, orang tua, pasien di rumah sakit, dan kaum lemah lainnya. Dengan tujuan membawa mereka ke tempat yang lebih aman.

6) Pemulihan segera terhadap prasarana dan sarana darurat.

Tim tanggap darurat biasanya bertugas untuk segera memulihkan kondisi prasarana yang menggalami kerusakan akibat bencana. Sedangkan sarana darurat juga segera dilakukan pemulihan karena merupakan hal yang mendukung dalam pemulihan dan penyelamatan korban bencana selanjutnya.

Penanggulangan bencana yang efektif dimulai dari pembentukan organisasi yang terstruktur dan sesuai sasaran yang akan dituju. Pembentukan sektor-sektor yang ada merupakan upaya yang cukup baik oleh kantor BKPBD. Karena, seluruh kegiatan serta sasaran yang akan dituju menjadi maksimal dengan adanya pembagian-pembagian kewenangan tugas di lapangan. Bantuan-bantuan juga akan tersalurkan dengan baik oleh masing-masing sektor di bidangnya ketika masa penanggulangan

d. Sumberdaya Penanganan Bencana Kantor BKPBD

Penanganan bencana memerlukan sumberdaya yang memadai sesuai dengan tingkat dan jenis bencana yang akan dihadapi. Oleh karena itu, manajemen atau pimpinan tertinggi Kantor BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) kota Yogyakarta menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk mengelola bencana di Kali Code.

a) Sumberdaya Manusia

Penanganan bencana memerlukan sumberdaya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi dan kemampuannya. Kantor BKPBD menyusun sistem manajemen bencana yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan struktur dan pembagian tanggung jawab masing-masing anggota staff. Selain itu dalam hal yang melibatkan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta lainnya yang lebih memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan maka terdapat pembagian manajemen penanggulangan bencana sesuai kegiatan dan kebutuhan masing-masing seperti untuk tim penanggulangan oleh BKPBD, tim medis oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, tim logistik, tim teknis dan lainnya (Data terdapat pada halaman lampiran).

Adapun langkah langkah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) kepada

masyarakat atau warga Kali Code sebagai berikut:

a. Melibatkan peran serta masyarakat dan pada akademisi dalam penataan sistem manajemen penanganan bencana melalui konsep pencegahan dan penanggulangan bencana alam (lahar hujan) dengan mempertimbangakan letak dan posisi geografis yang ada.

b. Melaksanakan forum koordinasi yang di dukung dengan komunikasi dan interaksi antara instansi vertikal horizontal maupun dengan masyarakat Kali Code.

c. Pemanfaatan peta bencana Yogyakarta dengan penataan daerah rawan bencana yang lebih nyaman, efisien dan berwawasan lingkungan melalui jalinan kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat Kali Code.

d. Meningkatkan jalinan kerja sama dengan pemerintah pusat melalui pemberian batasan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan daerah.

e. Meningkatkan jalinan kerja sama dengan masyarakat Kali Code, organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana lahar hujan di wilayah Kali Code.

b) Prasarana dan Sarana

didukung oleh prasarana dan logistik yang memadai. Bencana lahar hujan juga memerlukan sarana khusus untuk mengatasi dampak bencana seperti alat pengeruk tanggul yang jebol karena arus lahar hujan di Kali Code, alat *rescue*, peralatan medis, dan lainnya. Tanpa dukungan peralatan tersebut, jelas upaya penanggulangan akan terhambat bahkan gagal.

Dalam kasus penanganan bencana lahar hujan di Kali Code seperti dipaparkan di latar belakang penelitian ini warga Kali Code menuturkan bahwa menginginkan pengerukan pasir untuk membenahi tanggul yang jebol akibat arus lahar hujan dilakukan secepatnya, namun pada kenyataannya peralatan berat semacam itu kadang-kadang menurut Sugeng Priyanto sangat terbatas untuk diturunkan ke lokasi bencana. Hal tersebut menjadi kendala dalam fasilitas prasarana dan sarana yang ada di kantor BKPBD kota Yogyakarta.

c) Sumberdaya Finansial

Kegiatan manajemen tanggap darurat jelas membutuhkan biaya, baik sebelum kejadian maupun saat dan setelah kejadian. Sebelum kejadian diperlukan dukungan finansial untuk penyediaan perlengkapan, pelatihan personil dan masyarakat dalam membangun suatu sistem atau pusat komando penanggulangan bencana dengan baik.

Kantor BKPBD kota Yogyakarta memiliki waktu pada bulan Maret

keluarnya anggaran APBN untuk dana penanggulangan bencana, dan biasanya seluruh kegiatan penanggulangan bencana tergantung pada anggaran ini. Pada umumnya seluruh proses tersebut berhenti di bulan Desember yakni setiap akhir tahun.

Sumberdaya yang terlibat dengan kantor BKPBD juga masyarakat yang perlu diikutsertakan perannya dalam proses penanggulangan bencana sejak dari awal pencegahan terjadinya bencana. hal ini karena adanya perubahan paradigma dalam penanganan bencana bahwa masyarakat bukan lagi merupakan objek yang harus diselamatkan melainkan masyarakat merupakan pemegang peran terjadinya bencana itu sendiri.

Jadi, apa yang dimaksud dengan manajemen komunikasi bencana dari penjelasan masing-masing penerapan yang dilakukan kantor BKPBD diatas sudah sesuai namun belum "maksimal" dengan proses manajemen komunikasi yaitu, pengaturan penanggulangan masalah bencana yang melibatkan proses komunikasi, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, pendonor dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lestari dalam Budi [ed], 2011:87).

e. Pembuatan Laporan

Dalam sistem manajemen komunikasi bencana kantor BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) berikutnya adalah pelaporan bencana

penanggulangan bencana lahar hujan di wilayah Kali Code. Setiap kejadian yang terjadi di daerah kota Yogyakarta khususnya bencana lahar hujan harus dilaporkan kepada instansi atau pihak yang ditunjuk, dalam kasus ini kantor BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) kota Yogyakarta.

BKPBD merupakan bagian dari kesatuan Dinas Penanggulangan Kebakaran Bencana dan Perlindungan masyarakat yang dalam PP kota Yogyakarta masih menjadi satu bukan terpisah bagiannya dalam hal penanggulangan bencana. Oleh karena itu kewenangan BKPBD juga meliputi peran sebagai koordinator penanggulangan bencana antar seluruh jajaran SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yang terlibat dalam penanganan bencana khususnya di wilayah kota Yogyakarta.

Efektifnya Dinas Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta berdiri sendiri secara terpisah dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran maupun Perlindungan Masyarakat. Hal ini, akan berdampak pada pembagian kewenangan penuh untuk memaksimalkan penanganan bencana di Yogyakarta. Selain itu seluruh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta sarana dan prasarana yang dimiliki akan lebih maksimal sepenuhnya untuk memaksimalkan penanganan bencana khususnya bencana lahar hujan. Penambahan anggota tim yang masih terbatas di PKB Linmas untuk kegiatan serta koordinasi penanggulangan bencana bisa menjadi alasan pemisahan Seksi Penanggulangan Bencana. Dengan cara perekrutan pihak luar ataupun anggota resmi yang berkompeten di bidang

Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Wates yang sudah terlebih dahulu memisahkan Dinas Penanggulangan Bencana terpisah dengan Dinas Penaggulangan Kebakaran. Tujuannya adalah upaya maksimal penanganan bencana di wilayah Wates. Sekiranya BKPBD melalui kepala daerah kota Yogyakarta bisa mengikuti penataan kewenangan kerja Dinas Penangggulangan Bencana seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Wates.

Pelaksanaan operasi di lapangan dilakukan dengan registrasi. Registrasi adalah sebuah cara sistematis mengumpulkan informasi dan kelompok target dalam hal ini, registrasi ditunjukan untuk mengetahui jumlah keseluruhan kelompok target yang akan dibantu secara tepat dan langsung dari sumbernya (Lestari dalam Budi, [ed], 2011:99).

BKPBD yang telah melakukan pembagian kewenangan dan bantuan serta kegiatan menjadi 5 sektor yakni Sektor Koordinasi dan Manajemen, Sektor SAR, Sektor Kesehatan, Sektor Prasarana dan Sarana, serta Sektor Logistik. Semua dilakukan secara sistematis dalam pengumpulan informasi mengenai penentuan target sasaran, situasi, kegiatan, serta kebutuhan apa saja yang akan terimplementasi di lapangan baik kebutuhan bagi tim maupun bagi wilayah Code yang terkena bencana lahar hujan.

Pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari adanya kesalahpahaman persepsi dan kesalahahpahaman dalam distribusi bantuan di [illegible] BKPBD juga melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat Kali Code

dan pemanfaatan sumberdaya potensial seperti pemuda-pemuda di Kali Code untuk menjalankan pelaksanaan distribusi bantuan ke masyarakat.

Tahap koordinasi pada suatu kondisi darurat yang membutuhkan bantuan akan adanya lembaga yang terlibat, baik Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri maupun lembaga lokal. Koordinasi penting untuk menghindari kesimpangsiuran, tumpang tindih, keterlewatan (*overlook*) bantuan dan kekeliruan dalam penanganan penanggulangan bencana lahar hujan di Kali Code.

Pemerintah Kota Yogyakarta memegang peranan penting, kapasitas dan sumberdaya yang dimilikinya di atas kertas tentu akan berhubungan dengan kemampuan menangani bencana baik dari tahap pra-saat bencana maupun pasca bencana. Namun, pada bencana lahar hujan Kali Code nampaknya masih belum sempurna, dalam pengertian kapasitas pemerintah dalam menangani bencana, dan yang telah didasari dengan UU dan berbagai perangkat peraturan lainnya belum bisa dikatakan maksimal. Peran kunci terletak pada proses pertukaran informasi dan komunikasi yang bisa dijangkau dengan mudah.

Kondisi bencana tentu sangat berbeda dengan kondisi normal, maka kemudian tanpa pemahaman skenario dan simulasi pada situasi normal (mitigasi, kesiapsiagaan, "*early warning*") dan situasi bencana (manajemen bencana), aparat pemerintah akan berada pada titik rendah dalam aspek kesiapsiagaan. Harapan masyarakat kepada pemerintah adalah fokus aspek kemanusiaan, membantu korban dan

Sebuah pelajaran penting bagi Pemerintah Kota Yogyakarta yang berperan sebagai pengambil keputusan serta kebijakan publik untuk lebih serius dalam memahami aspek kebencanaan sebagai suatu peristiwa yang sangat kompleks.

Coombs (Susanto dalam Budi 2011:25) mengatakan bahwa regulasi pemerintah sangat penting untuk memastikan setiap penanganan bencana dilaksanakan dengan baik dan tepat, untuk itu diperlukan apa yang disebut NIMS (*National Incident Management System*), yang minimal memiliki 6 komponen, yaitu:

1. *Command & Management*
2. *Preparation*
3. *Resource Management*
4. *Communication & Information Management*
5. *Supporting Technologies*
6. *Ongoing Management & Maintenance*

Komponen-komponen tersebut jelas menunjukan dasar manajemen bencana, pada poin 1 dan 4 adalah hal yang cukup signifikan untuk didiskusikan, terutama karena dari berbagai pembahasan mengenai peristiwa bencana. Inti dari "*Command & Management*" adalah juga faktor komunikasi dan informasi, utamanya ketika harus memberi komando, mobilisasi atau berbagai tindakan yang harus dilajukan dalam

khususnya bencana lahar hujan yang terjadi di wilayah Kali Code. Termasuk sistem peringatan dini dan komunikasi peringatan dini harus didahului dengan pengetahuan dan pemahaman pemegang kepentingan bahwa resiko bencana dan arti informasi peringatan dini.

2. Manajemen Tanggap Darurat

Dalam konsep manajemen bencana dikenal dengan tahapan saat bencana. Tahapan ini disebut masa tanggap darurat, yang merupakan suatu siklus atau proses kontinyu, bertahap dan komprehensif. Selama ini upaya-upaya penanggulangan bencana hanya terfokus pada tahapan "*emergency response*" (tanggap darurat) yang biasanya berjalan selama 1-2 minggu, padahal seharusnya pada tahap masa sebelumnya yaitu masa pra bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana juga penting, agar kalau terjadi bencana jumlah korban dapat ditekan seminimal mungkin.

Korban bencana lahar hujan tahun 2011 menimbulkan banyakanya dampak kerugian bagi kehidupan warga Kali Code (baca: pengungsi) dan pada lingkungan sekitar. Perkembangan data bencana lahar hujan pada bulan Oktober 2011 hingga November 2011 masih didominasi kerusakan pada bendungan sekitar Kali Code yang berdampak pada meluapnya air ke pemukiman warga. Maka, tindakan mengungsikan

Berdasarkan aspek tata ruang maka lokasi barak pengungsian telah memenuhi syarat aman bagi pengungsi dari bencana lahar hujan di Kali Code. Akan tetapi yang masih perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana kebutuhan minimum bagi para pengungsi. Hal ini, sangat penting karena pengalaman pengungsian dari bencana lainnya seperti bencana erupsi Merapi tahun 2006 masih banyak masalah-masalah yang tidak perlu terulang pada bencana lahar hujan di wilayah Kali Code kota Yogyakarta.

Dalam UU No. 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bentuan pemenuhan kebutuhan dasar, artinya kebutuhan untuk menyambung hidup dan kehidupannya selama berada di tenda-tenda pengungsian.

Dalam konteks bencana lahar hujan, bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar tentunya harus menganut prinsip standar minimal kebutuhan dasar. Oleh karena itu, sangat BKPBD melakukan pengawasan melalui dinas terkait terhadap pemenuhan kebutuhan pengungsi korban lahar dingin tahun 2011. Begitu juga terhadap penanganan kelompok rentan seperti bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan manula. Dengan demikian asas pemberian bantuan harus berdasarkan pada prioritas untuk kelompok rentan dan harus adil.

Pengelolaan bantuan logistik yang pada saat itu dari segi jumlah sangat [illegible] distribusinya, serta perlu perkiraan kebutuhan *(need*

assessment) sehingga bantuan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Manajemen logistik ini sangat penting dan dapat dicapai apabila sistem informasi tentang kebutuhan pengungsi dikelola dengan baik. Saat ini sistem informasi kebutuhan tanggap darurat masih sebatas pengaksesan melalui alat komunikasi HT, telepon, internet (masih terlalu jarang digunakan/diakses).

Pengambil alihan komando tanggap darurat oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) merupakan penguatan kelembagaan tanggap darurat oleh BKPBD Yogyakarta. Masalah yang biasanya terjadi adalah mereka yang saat ini tinggal di sekitar bantaran Sungai Code yang terlalu berdekatan dengan bantaran sungai sehingga menimbulkan kekhawatiran akan membahayakan warga tersebut. Maka dari itu perlunya pemantauan yang dilakukan di lima titik pos pengamatan mengenai kesiapsiagaan akan adanya ancaman datangnya banjir lahar hujan ke wilayah Sungai Code bisa dikomunikasikan kepada mereka yang akan terkena dampak dengan rentangan jarak 40 menit sejak arus sungai melewati pos pemantauan di Ngentak, bukan agar berarti mereka harus mengungsi namun perlunya kesiapsiagaan untuk mengungsi.

Kantor BKPBD memiliki prosedur dalam penanganan penanggulangan bencana ketika masa tanggap darurat. Koordinasi yang dilakukan di lapangan merupakan kegiatan yang sifatnya berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat. Melalui SOP (Standar Operasional Prosedur) BKPBD Pemerintah Kota Yogyakarta.

SOP [illegible] menjelaskan alur tentang pelaksanaan kegiatan dalam

penanggulangan bencana kantor BKPBD Pemkot Yogyakarta. Pertama informasi mengenai kejadian bencana yang didapatkan melalui pos pemantauan di sampaikan ke PUSDALOPS BKPBD dengan pelaksana Staf Operasional dan Staf Radio kemudian di teruskan ke Kasi BKPBD akan adanya kejadian bencana. Kemudian, laporan diteruskan ke Ka. Kantor BKPBD, serta Walikota untuk tindakan pengambilan keputusan selanjutnya mengenai langkah apa saja yang akan dilakukan.

Berikutnya adalah menginterventarisasi data-data korban bencana, kerusakan, kebutuhan, dan kerugian yang diolah menjadi data lanjutan untuk pengambilan keputusan tindakan dalam masa tanggap darurat. Tindakan yang dilakukan adalah pembagian tim, di sesuaikan dengan pembagian lokasi yang terkena dampak bencana, persiapkan prasaranan dan sarana (disiapkan oleh seluruh dinas sesuai tupoksinya) kemudian semua pembagian tim tadi langsung menuju ke TKP. Langkah terakhir adalah mengevakuasi korban, jika ada korban yang terkena dampak bencana secara fisik akan di bawa oleh Mobil *Rescue* untuk berangkat ke tempat pengungsian atau tempat medis.

Hal ini sejalan dengan definisi penanggulangan tahap darurat menurut Ramli, Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana

Begitu juga dalam penjelasan menurut PP No. 11, langkah-langkah yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat antara lain; Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, sehingga dapat diketahui dan diperkirakan bagaimana bencana, luas area yang terkena dan perkiraan tingkat kerusakannya. Serta penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.

Maka bahwa adanya korelasi antara kantor BKPBD yang telah melakukan serangkaian kegiatan penanggulangan bencana tanggap darurat dengan cukup efektif dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan saat masa bencana. Terdapat keterkaitan pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan oleh BKPBD dengan apa yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 11 mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam masa tanggap darurat.

Dampak paling awal dari terjadinya bencana adalah kondisi darurat, bahwa korban tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan kapasitasnya sendiri. Kondisi ini harus bisa direspons secara tepat dan cepat, dengan tujuan utama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kali Code sebagai korban bencana lahar hujan sehingga kualitas hidup tidak makin parah. Setelah situasi darurat direspons, bencana harus ditangani secara menyeluruh baik substansi dan akar masalahanya. Dengan demikian kondisi darurat perlu dipahami sebagai salah satu fase dari keseluruhan resiko bencana itu sendiri.

Penanganan kondisi darurat pun perlu diletakkan dalam sebuah perspektif

adalah kondisi utama dimana penanganan serta manajemen bencana yang dilakukan oleh BKPBD dalam penanganan bencana lahar hujan Kali Code, adalah tujuan utama dari keseluruhan penanganan bencana mulai dari tahap para bencana hingga pasca bencana. Karena kondisi tanggap darurat bertujuan membangun situasi masyarakat korban bencana, yang tengah berada pada titik terendah untuk bertahan hidup secara sosiopsikologis ke keadaan yang lebih baik, sehingga penanganan manajemen bencana yang juga melibatkan masyarakat sebagai subyek saat terjadi bencana menjadi lebih efektif dan maksimal.

Situasi dalam peristiwa bencana tidak hanya melibatkan proses komunikasi dan informasi secara teknis, namun juga aspek sosiopsikologis yang harus diperhitungkan. Secara manajemen bencana itu sangat harus diperhatikan, namun yang lebih penting adalah bagaimana memastikan isi pesan, dari waktu ke waktu biasa dilakukan dengan baik, membawa ke arah penerimaan (menerima keadaan akibat bencana) dan reintegrasi (mulai membangun hidup baru).

Maka kemudian BKPBD terdapat PUSDALOPS (Pusat Kendali Operasion) menjadi bagian dari pusat komunikasi yang sangat penting untuk dipahami dan dikembangkan, ini berfungsi sebagai pelayanan informasi, namun yang lebih penting adalah pelayanan dan koordinasi komunikasi antar sektoral. Tugas selain pengumpul data-memverifikasi dan pengolah informasi bagi kebutuhan pengguna, juga melakukan pengolahan informasi secara berkala, dengan beberapa prinsip dasar

menggunakan teknologi secara maksimal dan yang paling penting adalah memastikan akses yang mudah bagi yang membutuhkan, terutama korban bencana.

3. Manajemen Informasi

Dalam sistem manajemen komunikasi bencana yang dilakukan BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Yogyakarta juga terdapat proses manajemen informasi. Meski BKPBD sendiri belum memiliki sistem informasi yang mendukung seperti peralatan dan teknologi yang cukup baik, sehingga kebijakan keselamatan belum didukung pengolahan data serta informasi penanggulangan bencana yang akurat. Manajemen informasi yang ada dilakukan oleh BKPBD, seperti manajemen informasi dengan menggunakan peralatan komunikasi peringatan dini saat pra bencana berupa HT dan EWS (*Early Warning System*), serta kegiatan sosialisasi sebagai pemberian informasi mengenai kebencanaan yang sifatnya mengedukasi warga masyarakat khususnya wilayah yang berdampak terkena bencana di Yogyakarta. Sosialisasi merupakan langkah efektif sebagai proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana agar mereka mampu mengantisipasi dan juga meminimalisir dampak bencana jika sewaktu-waktu wilayah mereka terkena bencana.

Sedangkan dalam pelatihan dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat, menyangkut pola komunikasi sebagai proses yang mendorong suatu tindakan untuk [illegible] dengan pemanfaatan saluran untuk mengirimkan pesan, mengeluarkan

stimulus untuk memperoleh respon yang diharapkan, memiliki maksud untuk mendorong munculnya perilaku yang dikehendaki.

3.1 Proses Manajemen Teknologi Informasi Bencana BKPBD

BKPBD dalam manajemen informasi ketika penanggulangan bencana lahar hujan di Kali Code dilakukan dengan pemasangan teknologi EWS (*Early Warning System*) di 5 titik posko pemantauan arus sungai serta ketinggian air Kali Code. Pemasangan EWS ini bertujuan untuk memberikan peringatan dini kepada warga atau penduduk yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Code agar mereka bisa mengantisipasi banjir lahar hujan yang sewaktu-waktu datang meluap ke pemukiman penduduk.

Peringatan dini adalah upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007).

Pada saat bencana lahar hujan tahun 2011 lalu pemasangan teknologi EWS ini menjadi hal yang memberikan peran penting selama masa pra bencana. Karena, berbeda di tahun 2011 lalu dampak kerugian akibat luapan banjir lahar hujan wilayah Kali Code berkurang dari tahun-tahun sebelumnya sebelum ada EWS. Cara kerja teknologi EWS bekerja layaknya suara "Horn" yang berfungsi memberikan

Namun, sayangnya berdasarkan laporan masyarakat dan pihak swasta yang LSM penanggulangan bencana di luar Pemerintah memberitahukan bahwa 5 alat EWS Pemkot Yogyakarta ternyata sudah lama mengalami kerusakan di 5 titik pemesangan EWS yang ada. Bahkan selama ini Pemerintah Kota Yogyakarta memanfaatkan EWS (*Early Warning System*) milik organisasi swasta yang juga berperan dalam penanggulangan bencana di Yogyakarta. Sangat disayangkan perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk fasilitas yang rawan dibutuhkan dalam kegiatan manajemen bencana sangat minim dan tidak maksimal.

Padahal proses penyampaian informasi tersebut merupakan langkah tindakan peringatan dini bagi masyarakat dan BKPBD sendiri sebelum mengambil tindak lanjut penanggulangan bencana secara terinci. Teknologi EWS (*Early Warning System*) menjadi upaya dalam memberikan informasi berupa peringatan dini bagi BPKBD kepada masyarakat Kali Code.

Berikutnya sejalan dengan pemanfaatan teknologi EWS sebagai peringatan dini, HT merupakan alat komunikasi yang juga digunakan oleh BKPBD untuk langkah manajemen informasi selanjutnya. HT berguna untuk mengkomunikasikan informasi secara verbal layaknya telepon seluler, namun terbatas dengan jarak frekuensi yang tersedia oleh HT itu sendiri. Fungsi dari alat komunikasi HT lainnya adalah mengkoordinasi dengan seluruh tim di lapangan dan juga anggota Petugas Radio Komunikasi di PUSDALOPS (Pusat Kendali Operasion) Pemkot Yogyakarta. Penyampaian informasi tersebut ditempuhkan melalui dua opsi yakni informasi

berita di Radio pribadi Pemerintah Kota Yogyakarta melalui staff Radio Komunikasi PUSDALOPS, dan informasi berupa komunikasi verbal melalui frekuensi HT ke perangkat desa wilayah Kali Code yang menjalin kerjasama dengan BKPBD Yogyakarta.

Informasi ketika debit ketinggian air meningkat hingga melewati batas normal, maka tim yang terdapat di lokasi pos pemantauan yang ada di sekitar Sungai Code akan mengkomunikasikan ke tim lainnya di PUSDALOPS untuk memberikan informasi agar tim BKPBD yang bertugas di lapangan menangani bencana dan juga warga sekitar Sungai Code bersiapsiaga menghadap banjir lahar hujan. Sebab, alat komunikasi HT juga telah diberikan sejak tahun 2011 sebelum bencana lahar dingin melanda di bulan Oktober hingga November 2011 kepada Kepala Lurah serta Camat yang ada di tiap wilayah Code. Informasi ini akan di teruskan dengan koordinasi tim evakuasi di lapangan kepada masyarakat agak melakukan tindakan kesiapsiagaan sebelum luapan arus lahar hujan dari pos pengamatan Ngentak menerjang wilayah Code kota Yogyakarta.

Penjelasan proses penyampaian informasi yang dilakukan BKPBD kota Yogyakarta dapat digambarkan alur informasinya sebagai berikut pada Bagan 3.2.

(Sumber : Kantor BKPBD Pemerintah Kota Yogyakarta)

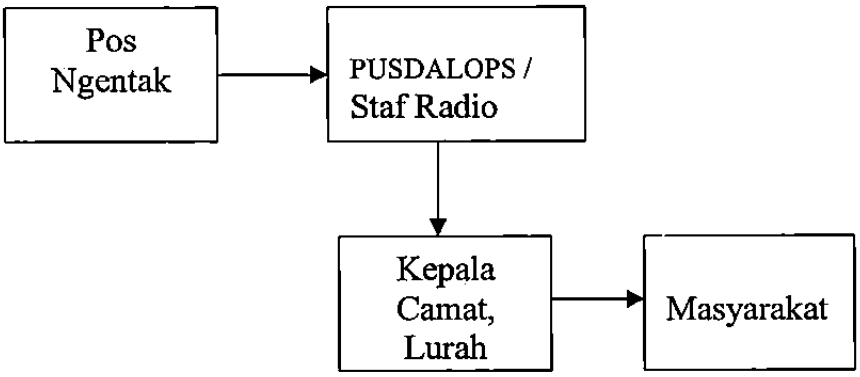

Bagan 3.2. Proses Pengiriman Informasi BKPBD

Pengolahan data informasi yang disampaikan berupa informasi mengenai kebencanaan terutama lahar hujan di wilayah Kali Code. Biasanya pengolahan data tersebut sifatnya hanya merupakan peringatan dan pemberitahuan awal ketika bencana lahar hujan akan terjadi oleh pos pengamatan Ngentak. Berikut merupakan kutipan informasi pesan yang disampaikan sebelumnya kepada PUSDALOPS BKPBD via HT – Radio PUSDALOPS:

> "Peringatan bahwa dari pos pengamatan di Ngentak sini, debit ketinggian Sungai Code telah melebihi batas normal, maka diharapkan tim penanggulangan bencana BKPBD bantaran Sungai Code di lokasi yang berpotensi bencana agar segera bersiapsiaga dengan kesempatan waktu 40 menit dari sekarang, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk saat lahar hujan telah menuju lokasi titik-titik rawan" (Sumber: Dokumen laporan penanganan tanggap darurat BKPBD).

Setelah proses pemberian peringatan kepada masyarakat di sekitar bantaran Kali Code, proses pengolahan data yang bertujuan untuk melakukan tindakan-tindakan melalui proses manajemen yang seperti di gambarkan oleh Amsyah pada

Aliran Informasi

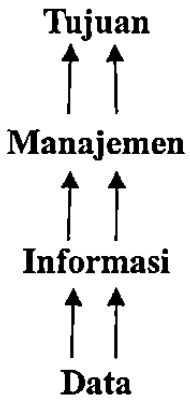

(Sumber: Amsyah, 1997:5)

Pengolahan data awal berupa pengamatan pada posko-posko yang melihat adanya kemungkinan terjadi bencana lahar hujan seperti yang dilakukan BKPBD Pemkot Yogyakarta kemudian diteruskan menjadi informasi kepada staf yang bertugas di pusat penerimaan informasi seperti PUSDALOPS (Pusat Kendali Operasion). Selanjutnya informasi yang disampaikan berupa frekuensi melalui HT diteruskan kepada masyarakat sekitar bantaran Kali Code dengan sebagai koordinatornya yaitu kepala Camat maupun Lurah yang telah dibekali alat komunikasi berupa HT.

Green menjelaskan bahwa setiap masukan data yang ada, akan muncul beberapa hal sebagai berikut:

a. Data yang bertahap (bahkan seringkali beruntun-reda) dalam situasi yang cepat berubah harus dikirimkan kepada pihak yang membutuhkan baik

b. Data harus dievaluasi dan diolah menjadi informasi (data baik, berkualitas dan dapat dipercaya).
c. Data harus bisa dibuat untuk pengembalian keputusan yang tepat.
d. Harus ada infrastruktur (ICT) yang cukup layak untuk mendukung proses, dan infrastruktur tersebut harus digunakan.
e. Harus ada cukup staf yang terlatih yang bisa mengerjakan hal tersebut.
f. Dari semua proses yang diperlukan, harus menunjukan gambaran yang tepat, detail dan dapat diandalkan (Green dalam Budi, 2011:29).

Langkah terakhir sesuai proses yang diterapkan oleh BKPBD yang telah dijelaskan Amsyah, merupakan proses pengolahan data mulai tahap kesiapsiagaan hingga masa tanggap darurat. Seperti data-data kerusakan, pengungsi, kelompok rentan (perempuan, anak-anak, manula, orang cacat), semua data tersebut wajib dibuat oleh seluruh dinas terkait yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian dinas-dinas tersebut memberikan hasil laporan kepada BKPBD untuk di *cross chek* lagi sehingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang bertujuan menangani masalah yang ada di lapangan. Maka BKPBD pun membuat kebijakan-kebijakan mulai dari strategi, sasaran, kegiatan, dan kebutuhan seperti yang telah di bahas pada pembahasan sebelumnya.

Jadi, data yang didapat berupa hasil pengamatan melalui pos pengamatan yang tersedia di 5 titik seperti data bahwa ketinggian air sungai telah melebihi batas

BKPBD dan juga masyarakat agar bersiapsiaga menghadapi bencana maupun melakukan tindakan tanggap bencana lainnya. Tindakan tersebut merupakan langkah lanjutan dalam proses selanjutnya yaitu manajemen bencana. Seperti, evakuasi warga, persiapan logistik, prasaranan dan sarana kebutuhan bagi tim BKPBD maupun warga. Dan pada akhirnya semuanya bermuara ke satu tujuan untuk meminimalisir ataupun mencegah kerugian-kerugian yang lebih banyak ketika bencana lahar hujan melanda hingga meluap ke pemukiman warga Code.

Meskipun begitu peralatan teknologi dalam sistem informasi yang diterapkan oleh BKPBD masih terbilang manual dan monoton karena hanya memaksimalkan ketiga unsure yang ada yakni EWS (*Early Warning System*) yang notabene mengalami kerusakan dan belum diperbaiki, HT, serta pusat pemantauan Radio yang dijalankan di kantor BKPBD sendiri. Sedangkan untuk teknologi-teknologi informasi yang lebih canggih seperti GIS (*Geographic Information System*) masih bergantung pada pusat kantor BNPB.

Kendalanya yaitu tetap pada minimnya anggaran untuk memaksimalkan teknologi informasi atau bahkan hanya dengan mengandalkan teknologi yang sudah ada BKPBD merasa sudah cukup mampu dalam penanggulangan bencana yang *didukung oleh* sistem informasinya. Kekurangan dalam sumber daya manusia yang dimiliki BKPBD juga menjadi acuan kurang maksimalnya proses manajemen informasi yang ada. Hal ini terlihat pada tidak adanya sarana internet berupa layanan

akses *website* pribadi milik BKPBD. Padahal ini berguna bagi bentuk informasi yang kontinyu serta *update* informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota Yogyakarta mengenai kebencanaan di Yogyakarta. Pada awalnya BKPBD memang sempat membuat sebuah *website* yang direncanakan untuk menaruh segala informasi kebencanaan yang ada, namun sayangnya ketidakmampuan mengoptimalkan oleh SDM yang dimiliki BKPBD menjadi web tersebut terbengkalai hingga sekarang para staff BKPBD lupa alamat webnya sendiri.

3.2 Manajemen Informasi Interaktif

Manajemen informasi berikutnya adalah bentuk kegiatan sosialisasi rutin yang dilakukan oleh Kantor BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) yang biasanya dilakukan dengan inisiatif serta dana swadaya masyarakat Code. Kegiatan sosialisasi ini merupakan permintaan dan desakan warga Code kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Derah agar mau memberikan pendidikan mengenai informasi kebencanaan hingga kegiatan pelatihan tanggap bencana.

Sosialisasi juga merupakan langkah yang dinilai efektif sebagai langkah pencegahaan dini masyarakat yang berpotensi terkena bencana ke depannya, khususnya masyarakat Kali Code yang sering terkena dampak bencana lahar hujan sejak tahun 2008 lalu. Langkah-langkah penyampaian informasi kepada masyarakat dan warga Kali Code pun difokuskan terhadap kesiapsiagaan masyarakat ketika akan

menghadapi bencana yang datang hingga tindakan-tindakan di masa tanggap darurat.

Informasi yang disampaikan biasanya berupa diskusi antara warga dengan tim pelaksana dari Kantor BKPBD Yogyakarta. Diskusi ini dilakukan di pelataran tempat yang ada di sebelah kantor Dinas BKPBD sendiri. Lengkap dengan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Sehingga warga memiliki pengetahuan bagaimana melakukan kegiatan tanggap darurat maupun saat menghadapi bencana sebelum bencana benar-benar menimpa wilayah mereka.

Berkaitan dengan manajemen komunikasi bencana, bahwa komunikasi berfungsi sebagai radar sosial, yaitu memberikan kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana disuatu tempat. Komunikasi ini memancarkan kepada seluruh masyarakat mengenai bencana apa yang terjadi, kapan bencana itu terjadi di mana, bagaimana kondisi mereka, mengapa bisa terjadi, dan masyarakat harus bagaimana?.

Komunikasi sebagai manajemen, artinya komunikasi yang disampaikan dan diterima oleh masyarakat menjadi dasar pelaksanaan tindakan tertentu. Dengan adanya informasi tentang bencana lahar hujan, masyarakat Kali Code dan sekitarnya menjadi waspada, dan melakukan berbagai persiapan untuk menyelamatkan diri. Bahkan adanya informasi bahwa lahar hujan akan menuju ke likasi Kali Code kota Yogyakarta dalam waktu 40 menit dari pos pemantauan Ngentak warga msyarakat

Mengingat pentinganya komunikasi melalui manajemen informasi bencana ini, maka Pemerintah Kota Yogyakarta mellui BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) diharapkan membuka jalur telepon *hotline* 24 jam dengan masyarakat yang diharapkan akan menjadi jembatan komunikasi yang tepat untuk menghidari keterlambatan penanganan bencana. Harus diakui, ini merupakan langkah maju dalam manajemen komunikasi penanganan bencana yang selalu dilaksanakan dalam situasi tanggap darurat.

Dengan akses langsung tersebut BKPBD yang telah memberlakukan penerapannya terlebih dahulu namun masih dengan menggunakan alat komunikasi HT, BKPBD jika saja lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi lain seperti akses telepon *hotline* akan dapat segera mengambil keputusan untuk mengkoordinasikan tindakan terkait dengan penanganan bencana lahar hujan khususnya di Kali Code yang akan, sedang maupun telah terjadi.

Pemkot Yogyakarta juga perlu mengefektifkan saluran komunikasi bencana intra maupun antar RT/RW, desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga ke provinsi. Melalui jalinan komunikasi ini, peringatan dini bencana alam akan segera disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berdampak terkena bencana, sehingga korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisasi. Laporan terjadinya bencana, wilayah yang tertimpa dan jumlah korban, juga bisa dilakukan segera untuk mendapatkan penanganan penanggulangan sebagaimana mestinya. Seperti yang juga [illegible] BKPBD Kota Yogyakarta saat melakukan rapat

pertemuan untuk diskusi pembahasan pengambilan keputusan dengan langkah penyamaan persepsi ketika penanganan penanggulangan bencana lahar hujan dengan seluruh dinas - dinas terkait di Pemerintahan Kota Yogyakarta.

Sebagai sarana alternatif, komunikasi sosial dapat melepaskan ketegangan yang terjadi. Seperti, kegiatan pemulihan kondisi psikologis korban bencana lahar hujan dilakukan dengan kegiatan komunikasi bercerita, permainan, kesenian, dan lain-lain yang dilakukan oleh para relawan yang bekerja sama dengan kantor BKPBD di lokasi pengungsian. Tujannya agar mereka dapat menghibur para pengungsi yang berada dalam kondisi jenuh dengan situasi terkena bencana lahar hujan.

Dalam manajemen bencana, paradigma berubah dari penanganan saat terjadi bencana menjadi upaya meminimalisasi-pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Salah satu kendala yang menjadi kebiasaan ketika proses penanganan bencana adalah koordinasi, komunikasi, informasi dan kerjasama. Maka dalam konteks operasi manajemen bencana diperlukan sistem dan kepemimpinan yang kuat, salah satu aspek yang penting adalah "*Incident Command System*". Pelaksanaan ICS tersebut juga didukung oleh sistem komunikasi dan informasi yang baik, seperti penguatan pusat komunikasi. Pada kasus ini BKPBD hanya perlu mengoptimalkan PUSDALOPS sebagai pusat komunikasi yang lebih kuat dalam menginformasikan

Pusat komunikasi dan manajemen yang baik akan membantu fokus pada tugas kemanusiaan, yaitu menyelamatkan korban bencana dan mengurangi resiko yang lebih buruk. Sistem komunikasi yang baik akan membantu kelancaran dan kondisi psikologis masyarakat khususnya Kali Code agar bisa akhirnya menatap masa depan dengan lebih baik pasca peristiwa bencana lahar hujan 2011.

3. Beberapa Faktor Lain

4.1. Faktor Penentu Keberhasilan

Dengan menggunakan konsep strategic *Analysis and Choices* (SAC) yang diperoleh dari penyaringan faktor lingkungan internal yang berupa kekuatan dan kelemahan maupun dari faktor lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman serta dikaitkan dengan adanya visi misi yang harus dicapai, maka dihasilkan *Critical Success Factors* (CSF) sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang ada dapat mewujudkan pemerinntahan yang baik dan bersih di sektor pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran.
2. Banyak melibatkan peran swasta dalam pelaksanaan pembangunan terutama penyediaan sarana dan prasaran daerah yang terkena bencana.
3. Mengajak masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam mengatasi permasalahan di sektor pencegahan dan penanggulangan bencana dan

4. Penggunaan peralatan yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga akan diperoleh hasil pembangunan yang optimal.
5. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat.
6. Menciptakan suatu peraturan perundang-undangan baik yang menyangkut sistem mapun sarana dan prasarana dengan melibatkan SDM-SDM yang menguasai bencana.
7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana melalui pengadaan peralatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Peningkatan dukungan dari Pemerintah Pusat mengingat potensi Kota Yogyakarta sebagai daerah rawan bencana di Indonesia.
9. Peningkatan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kantor penanggulangan Kebakaran Bencana dan Perlindungan Masyarakat.
10. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana dengan melibatkan peran Pemerintah Pusat.
11. Menciptakan peraturan perundang-undangan terutama yang menyentuh

12. Peningkatan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta menjaga sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran dengan penerapan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

4.2. Faktor Ancaman Kegagalan

Selain faktor-faktor penentu keberhasilan, perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan yaitu:

1. Kurangnya kepedulian masyarakat kepada keselamatan akibat bencana alam (lahar hujan).
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana.
3. Kurangnya keterpaduan penyelamatan antara pemerintah, masyarakat dan komunitas.
4. Kurangnya sarana dan prasarana untuk penyelamatan korban bencana.
5. Kurangnya kecepatan koordinasi tanggap darurat antara pemerintah, masyarakat dan komunitas.

5. Evaluasi Bagi Dinas Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Linmas Pemerintah Kota Yogyakarta

Terakhir dalam sistem manajemen komunikasi bencana adalah audit

manajemen bencana dalam suatu organisasi, apakah sudah sesuai atau telah memenuhi persyaratan atau tolok ukur yang ditetapkan (Ramli, 2010:67).

Setelah serangkaian pembahasan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana yang diterapkan BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) kota Yogyakarta. Maka terdapat pula proses evaluasi yang didapat setelah keseluruhan proses penanggulangan bencana dari perencanaan hingga masa tanggap darurat terhadap bencana lahar hujan wilayah Kali Code. Pada dasarnya proses evaluasi ini akan menjadi bahan acuan dalam pembuatan perencanaan (kontijensi) di tahun berikutnya untuk mendapatkan gambaran mengenai penanganan bencana lahar hujan melalui pengalaman penanganan pada tahun-tahun sebelumnya terhitung tahun 2010 dan 2011. Evaluasi yang dirangkum merupakan evaluasi dari tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

a. Pra Bencana

Pada tahap ini proses pelaksanaan kegiatan serta perencanaan untuk melakukan seluruh rangkaian penanggulangan bencana lahar hujan di tahun 2011 lalu mulai dari proses identifikasi resiko bencana, perencanaan (kontijensi), dilakukan oleh kantor BKPBD dengan cukup baik. Sebab, proses perencanaan yang dilakukan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas - Dinas Pemerintah terkait. Dengan melakukan pertemuan diskusi yang bertujuan penyamaan persepsi

sangat terinci dengan jelas dan detail. Namun belom mau mengoptimalkan jalinan kerja sama yang kuat dengan pihak swasta yang ada agar lebih efektif dalam penanganan bencana di wilayah Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri terbilang sangat egois untuk hal berkoordinasi tanpa melibatkan jauh peran swasta yang juga memiliki peran tanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di Yogyakarta. Padahal jika hubungan relasi ini kuat terjalin dan Pemkot Yogakarta sendiri mau membuka jalinan kerja sama yang kuat, tentu hal ini akan sangat membantu dalam proses penanggulangan bencana di wilayah Yogyakarta serta meminimalisir hambatan yang ada dalam proses penanggulangan bencana selama ini. Karena sejatinya masyarakat membutuhkan dari segala aspek lapisan organisasi pemerintah maupun non pemerintah untuk membantu menangani bencana yang menimpa mereka.

b. Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Pada tahap berikutnya pelaksanaan kegiatan masa tanggap darurat telah diimplementasikan cukup sehingga mampu meminimalisir dampak bencana lahar hujan di wilayah Kali Code. Rangkaian yang dilakukan mulai manajemen organisasi, manajemen koordinasi, prosedur penanggulangan bencana dilapangan, serta manajemen informasi yang telah dilakukan sejak masa pra bencana hingga masa tanggap darurat. Namun perlunya perhatian pemerintah dalam menggalang kerja

sendiri serta kemampuan SDM BKPB ataupun staff-staff kepegawaian di seluruh kantor pemerintahan Kota Yogyakarta dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana prasarana berbasis TI (Teknologi Informasi). Hal tersebut tentu sangat bermanfaat untuk keberhasilan yang lebih baik bagi seluruh aspek-aspek tupoksi masing-masing di Pemerintah Kota Yogyakarta itu sendiri.

Pada tahun 2011 lahar hujan yang melintasi wilayah Sungai Code di Kota Yogyakarta hanya menyebabkan tanggul penahan jebol dan mengakibatkan luapan Sungai Code memasuki pemukiman penduduk. Oleh karena itu proses penanggulangan pasca bencana seperti rekonstruksi bangunan prasarana dan sarana, serta rehabilitasi kerusakan-kerusakan maupun kerugian material di wilayah sekitar Kali Code tidaklah terjadi bahkan hampir tidak ada yang dikategorikan kerugian berarti.

Jelaslah sudah tolok ukur keberhasilan meminimalisir dampak bencana lahar hujan pada tahun 2011 oleh BKPBD kota Yogyakarta yang sejalan dengan visi dan misi mereka untuk mengurangi serta meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh bencana lahar hujan, namun tidak cukup hanya berpatokan pada hal tersebut. Sebaiknya hal-hal teknis dan manajemen yang dilakukan masih sangat membutuhkan perbaikan dari segi koordinasi dan manajemen informasi. Tentu semua terjadi harus ada proses manajemen penanggulangan bencana yang diterapkan dengan lebih baik

Selain tolok ukur berhasil atau tidaknya meminimalisir dampak bencana oleh BKPBD (Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah) Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2011 seperti pembahasan sebelumnya, maka ada pula permasalahan-permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan bagi kantor Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Derah Kota Yogyakarta selain beberapa aspek yang juga sudah dikaji sebelumnya. Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan aspek sumberdaya organisasi (BKPBD Yogyakarta), permasalahan-permasalahan yang dihadapi:

a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan, dan penanggulangan bencana. Seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa keselamatan.
b. Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang penanggulangan kebakaran dan bencana.
c. Belum adanya Sistem Informasi bencana sehinga kebijakan keselamatan belum didukung dengan data dan informasi yang akurat.
d. Masih lemahnya peran masyarakat dalam pengetahuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana.
e. Keterbatasan sumber dana yang dimiliki daerah yang tidak sebanding dengan tuntutan masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan dan penanggulangan bencana.